



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Panitia Angket KPK Minta Tambahan Waktu
Tanggal : Jumat, 15 September 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 10

Panitia Angket KPK Minta Tambahan Waktu

Perpanjangan masa kerja dimilai sebagai bukti pembentukan Panitia Angket tak memiliki data awal.



Hussein Abri Dongoran
hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA — Panitia Angket Komisi Pemberantasan Korupsi berencana meminta perpanjangan masa kerja Wakil Ketua Panitia Angket KPK, Masinton Pasaribu, berdasarkan suratnya yang dibubuhkan tanda-tangan untuk meminta tambahan waktu terhadap auditor pada Juli lalu. Penangkapan itu berkaitan dengan perkara penerimaan suap oleh auditor utama BPK, Rochmadi Saptogiri, dan stafnya, Ali Sadli, yang disinyalir diperoleh untuk memberikan opini "Wajar tanpa Pengecualian" kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teritorial, dan Transmigrasi.

Wakil Ketua Panitia Angket dari Fraksi Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, menambahkan, perpanjangan waktu itu ditutubkan karena hingga saat ini Panitia Angket belum bisa mengambil kesimpulan. Alasannya, kata dia, KPK kerap kali menolak datang ke Panitia Angket. "Kesimpulan yang jadi sepihak dan tidak adil. Kami perlu KPK hadir untuk konfirmasi," ujarnya.

Sejak kawal pimpinan KPK menegaskan tidak akan hadir sebelum Mahkamah Konstitusi menutuskan uji materi alih selanjutnya dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD, Gugatan dilayangkan sejumlah pegawai KPK menyusul pembentukan Panitia Angket pada akhir April lalu.

Sejumlah pakar hukum tata negara menilai Panitia Angket cacat hukum lantaran hak angket tak

dapat dikenakan terhadap KPK. Penggunaan hak penyelidikan Dewan ini pun dianggap hanya sebagai akal-akalan untuk melemahkan komisi antirasus saat sedang menyelesaikan kasus besar termasuk megakorupsi e-KTP yang belakangan menyeret Ketua DPR Setya Novanto.

Sejumlah partai politik yang tidak mendukung keputusan hak angket menyatakan akan menolak permohonan perpanjangan waktu. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan perpanjangan masa kerja hanya akan membuat waktunya. "Karenanya (Panitia Angket) ini betul-betul untuk melemahkan KPK," ujarnya. Menurut Syarief, permintaan Panitia Angket tersebut juga menandakan ketidaksiapan mereka dalam mengumpulkan dan menemukan kesalahan KPK.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menuturkan partainya akan menolak usul tersebut. Menurut dia, sejak awal Gerindra menilai Panitia Angket dibentuk untuk melemahkan KPK. "Kesimpulannya nanti juga akan melemahkan KPK. Kami pun akan tolak juga rekomendasinya," kata dia.

Pansus Menuding, KPK Menjawab

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menyatakan masa kerja Panitia Angket KPK sudah cukup dan harus berakhir pada 28 September mendatang. Menurut dia, temuan Panitia Angket pun sudah ditanyakan oleh anggota Komisi Hukum yang juga bergabung di Panitia Angket dalam rapat dengan pendapat dengan KPK sejak Senin hingga Selasa lalu. Adapun anggota Komisi Hukum dari Partai Demokrat, Erma Ranik, heran karena rapat tersebut bernuansa Panitia Angket. Berikut ini merupakan temuan Panitia Angket yang ditanyakan oleh Komisi Hukum.

KLAIM PANITIA ANGKET:

1. KPK ditutup sebagai lembaga superbodi, tak siap diwasai.
2. KPK ngotot harus diwasai oleh DPR.
3. Dalam fungsi koordinasi, KPK ditutup cenderung berjalan sendiri tanpa memperbaiki kehormatan dan kepercayaan publik atas lembaga negara serta penegak hukum.
4. KPK dianggap lebih mengedepankan penindakan daripada pencogahan.
5. Dalam fungsi supervisi, KPK ditutup lebih cenderung menangani kasus tanpa koordinasi.
6. KPK ditutup tidak berpedoman pada KUHP dan mengabaikan hal-hal manusia dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
7. DPR ingin mempertahankan independensi di KPK.
8. DPR menuduh ada friski di KPK antara penyidik Polri dan independen, antara atasan dan bawahan.
9. DPR menuduh penggunaan anggaran KPK banyak yang belum dipertanggungjawabkan.
10. DPR menuduh barang rampasan banyak yang tidak tercatat.
11. DPR menuduh KPK batali perlindungan saksi dan korban tidak sesuai dengan aturan.

DITANYAKAN DALAM RAPAT KOMISI HUKUM DEWAN

1. Barang-barang Rampasan
2. Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan
3. Rekrutmen Penyidik Internal
4. Temuan BPK
5. Pengaduan Masyarakat

JAWABAN KPK DALAM RAPAT KOMISI HUKUM

1. Barang-barang Rampasan
2. Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan
3. Rekrutmen Penyidik Internal
4. Temuan BPK
5. Pengaduan Masyarakat

• HUSSEIN ABRI DONGORAN